

MENJEMBATANI “GAP” ANTARA PEMIMPIN DAN RAKYAT

Oleh Nurcholish Madjid

Sudah beberapa tahun kita memasuki “era” pembangunan dengan dilaksanakannya Pelita Pertama. Tetapi sekalipun telah selama itu berjalan, masalah bagaimana membangkitkan partisipasi rakyat banyak secara aktif masih merupakan bahan pembahasan yang tetap menarik. Soalnya, jika pembangunan itu berjalan irama partisipasi mereka — jadi dengan jalan paksa dari atas saja — atau dalam waktu yang cukup lama hanya merupakan kehendak baik dari pemerintah saja, maka selain tidak ada jaminan bagi berhasilnya pembangunan, hal itu juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang apa manfaat sebenarnya suatu pembangunan dan untuk siapa.

Usaha pembangunan, khususnya yang dikerjakan oleh suatu bangsa yang karena telah tertinggal jauh oleh lain-lainnya kemudian hendak mengejar dengan waktu yang relatif singkat, adalah usaha yang bersifat sengaja dan penuh pertimbangan (*deliberate*) dan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan teliti (*elaborate*). Karena itu, peranan terbesar dilakukan oleh mereka yang mempunyai konsep-konsep dan pikiran-pikiran tentang pemecahan masalah-masalah, yaitu yang dikenal dengan sebutan “teknokrat”. Konsep-konsep dan pikiran-pikiran itu mereka rumuskan dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang mereka miliki setelah melalui perenungan tentang penerapannya dalam dunia nyata. Sedangkan ilmu itu sendiri merupakan proses yang panjang — hampir seumur dengan

umat manusia — dari penarikan kesimpulan-kesimpulan umum atau generalisasi tentang kasus-kasus khusus yang mempunyai regularitas dalam pola-polanya.

Sekarang, yang sempat memiliki ilmu tersebut hanyalah sedikit sekali. Karena kesedikitannya, mereka kemudian menduduki tempat sebagai golongan atas atau elite. Ibarat hukum *supply and demand* yang menentukan harga benda ekonomi, demikian pula keadaan kaum ilmuwan. Hal itu berarti bahwa sebagian besar rakyat tidak mengikuti proses induktif terjadinya ilmu-ilmu dan konsep-konsep tersebut, hal mana adalah memang tidak mungkin. Maka penyuguhan konsep-konsep itu kepada rakyat berada dalam perumusan yang matang dan terputus dari kasus-kasus yang mendukungnya, sehingga dengan sendirinya menjadi bersifat abstrak. Dalam keadaan seperti itulah rakyat tidak mengerti apa makna pembangunan, yang selanjutnya melahirkan *gap* atau jurang komunikasi antara pemimpin-pemimpin konseptor dengan massa rakyat yang hendak melaksanakannya. Kelanjutan dari *gap* itu ialah tidak adanya partisipasi, sehingga tampak pembangunan itu seperti sesuatu yang diberikan dari atas, sedangkan rakyat menerimanya dengan pasif, masa bodoh, atau malah mungkin disertai rasa curiga.

Mungkin benar juga mereka yang mengatakan bahwa keadaan seperti itu hanya terjadi pada proses permulaan pembangunan saja. Alasannya adalah bahwa segera setelah rakyat merasakan manfaat pembangunan itu, maka akan terbitlah kegairahan mereka untuk ikut berpartisipasi. Tetapi hal itu benar kalau tidak adanya partisipasi itu terjadi secara kebetulan (*accidental*), yaitu karena ketidakmengertian yang murni bukan karena pengertian yang lain atau berlawanan tentang apa yang baik, berguna dan benar untuk rakyat.

Suasana Orde Baru, ditinjau dari segi ide-idenya yang sedikit banyak kontras terhadap Orde Lama, melahirkan keadaan tersebut belakangan itu. Berkat indoktrinasi yang amat intensif di zaman Orde Lama, terdapat cukup besar rakyat yang mempunyai pengertian-

pengertian yang berbeda dari yang sekarang dianut tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh bangsa Indonesia, termasuk pembangunan. Memang dulu pernah dilakukan dedoktrinasi, tetapi tampaknya hanya sepintas lalu saja. Sedangkan sebagai konsekuensi penganut paham-paham yang lebih pragmatis dalam cara kerja, maka Orde Baru tidak mungkin melakukan indoktrinasi yang sebanding dari segi cara maupun isi dengan Orde Lama. Hal ini membuat rakyat seperti tanpa pegangan (jika dedoktrinasi berhasil), atau memandang masih ada gunanya “memegang” ide-ide lama meskipun tak peduli lagi dengan pelaksanaannya. Ini pun cukup menghambat tumbuhnya partisipasi yang spontan dan antusias, bahkan ide-ide lama itu ibarat api dalam sekam, tinggal menunggu waktu yang cukup panas untuk menyala dan berkobar ke luar.

Sudah tentu ini semua memerlukan pemecahan. Pemecahan itu terletak dalam usaha menutupi *gap* antara para pemimpin konseptor dengan rakyat. Sudah lama “tukang-tukang diskusi” menemukan adanya kekurangan tenaga yang sanggup menjembatani jurang itu. Tenaga itu ialah mereka dari kalangan menengah (dalam pengertian sosial-politik), yang “kerasan” (*at home*) di kalangan atasan dan kerasan pula di kalangan rakyat banyak, atau sebaliknya secara pasif mereka itu “diterima” oleh kedua kalangan atas dan bawah.

Sekarang jalur-jalur vertikal (atas bawah) itu ada dengan mengikuti garis-garis gaya gabung atau afinitas sosial kultural, selain gaya gabung kedaerahan yang relatif lebih lemah. Maka seorang penengah adalah mempunyai kepribadian dan kemampuan sebegitu rupa sehingga dalam kalangan “atasan” dia adalah inklusif Indonesia dan dalam kalangan “bawah” eksklusif kelompok budayanya. Hal itu tampak seperti kontradiksi interminus. Justru dia harus menemukan korelasi antara keduanya dalam suatu konsep yang menyeluruh. Dan hal itu tidak sulit kalau kita yakin kepada prinsip pluralisme sosial, dan paham akan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, berbeda tapi satu! [❖]